
Academia Open



By Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement.....	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article.....	5
Title page.....	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	7

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode>

Academia Open

Vol. 11 No. 2 (2026): December
DOI: 10.21070/acopen.11.2026.15071

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

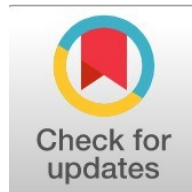
Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Local Fiscal Capacity Supports Poverty Reduction: Kapasitas Fiskal Daerah Mendukung Pengentasan Kemiskinan

Meisya Ayu Devina, 22011010176@student.upnjatim.ac.id (*)

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

M. Taufiq, m.taufiq.ep@upnjatim.ac.id

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

(*) Corresponding author

Abstract

General Background: Poverty remains a central regional development challenge requiring employment creation, inclusive economic expansion, and adequate fiscal capacity. **Specific Background:** Bangkalan Regency recorded persistently higher poverty levels than East Java despite changing labor-market conditions, fluctuating economic performance, and rising locally generated revenue. **Knowledge Gap:** Previous studies reported inconsistent relationships between unemployment, economic growth, fiscal resources, and poverty, requiring location specific time-series evidence. **Aims:** This study examines the effects of the open unemployment rate, economic growth, and locally generated revenue on poverty during 2000–2024. **Results:** A quantitative design used 25 years of secondary data from Statistics Indonesia and the Ministry of Finance, analyzed through multiple linear regression in EViews 12. The model satisfied normality, multicollinearity, heteroskedasticity, and autocorrelation diagnostics. Collectively, the three predictors were significant, $F = 9.566761$, $p = 0.000350$, with an adjusted R^2 of 0.517105. The open unemployment rate was not significant ($\beta = -0.051679$, $p = 0.8703$), and economic growth was also not significant ($\beta = 0.117414$, $p = 0.7191$). Locally generated revenue showed a significant negative coefficient ($\beta = -0.038981$, $p = 0.0002$). **Novelty:** The study simultaneously evaluates labor-market, macroeconomic, and fiscal determinants using a 25-year district-level series. **Implications:** Regional authorities should strengthen fiscal capacity, improve revenue allocation, and direct spending toward infrastructure, education, health, small enterprises, and inclusive economic opportunities.

Highlights:

- Fiscal receipts showed $\beta = -0.038981$ with $p = 0.0002$.
- Labor-market participation yielded $p = 0.8703$; output expansion yielded $p = 0.7191$.
- The joint model reached $p = 0.000350$, explaining 51.71% of variance.

Keywords: Economic Growth, Local Own Source Revenue, Open Unemployment Rate, Poverty

Published date: 2026-08-06

Pendahuluan

Saat ini kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pada pembangunan ekonomi yang mana dihadapi oleh negara. Kemiskinan tak hanya berkaitan dengan terbatasnya pendapatan, tapi mencerminkan juga rendahnya akses masyarakat terhadap berbagai aspek. Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan adalah tolak ukur penting untuk menilai capaian pembangunan ekonomi suatu wilayah. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program pengentasan kemiskinan, kesenjangan tingkat kemiskinan antar wilayah masih tetap terjadi, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Sebagian kabupaten/kota menunjukkan naiknya kemiskinan yang relatif rendah, sementara daerah lain justru masih mencatat tingkat kemiskinan yang ada di atas rerata provinsi, contohnya Kabupaten Bangkalan. Rata-rata tingkat kemiskinan Kabupaten Bangkalan dalam beberapa tahun terakhir masih berada jauh di atas Provinsi Jawa Timur, menunjukkan permasalahan kemiskinan di wilayah ini memerlukan perhatian khusus.

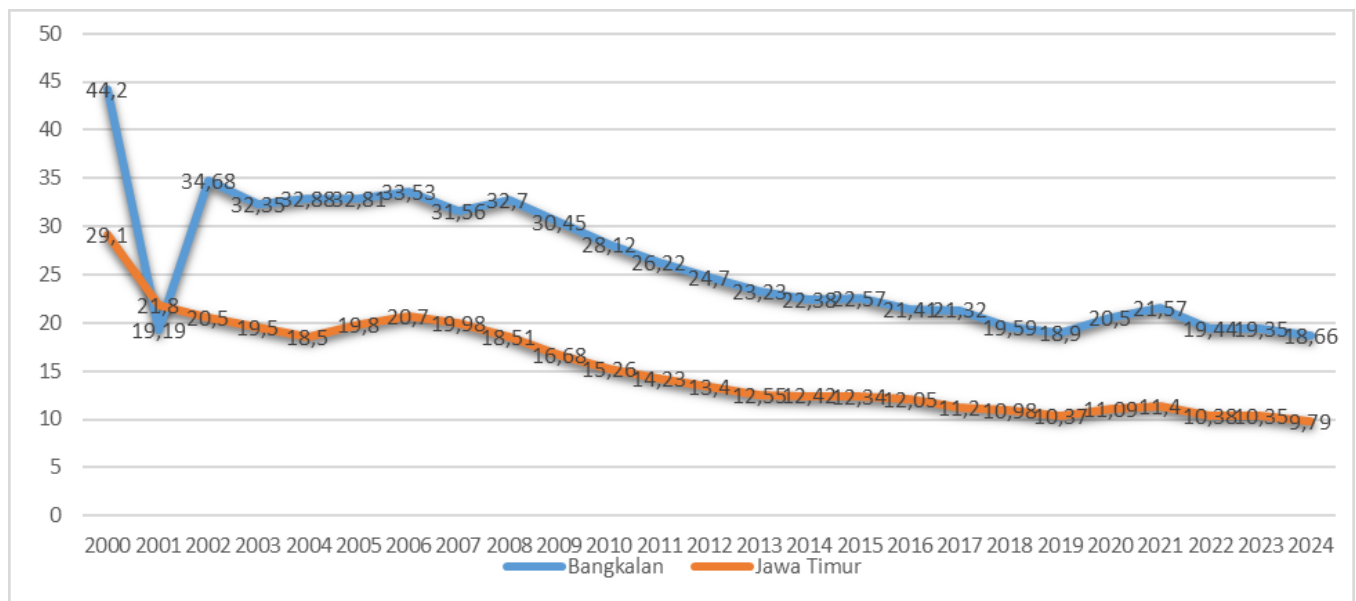


Figure 1. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bangkalan dan Provinsi Jawa Timur 2000-2024

Merujuk pada gambar 1 diatas, berdasarkan data BPS menunjukkan bahwasanya di Kabupaten Bangkalan persentase penduduk miskinnya selalu tinggi dan diatas persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Timur. Pada periode 2000 sampai 2013 kemiskinan di Kabupaten Bangkalan cenderung mengalami penurunan dengan pola fluktuasi, dari 44,2% turun 24,7% pada tahun 2000 dan 2013. Meskipun sempat terjadi kenaikan pada beberapa tahun awal 2000an. Pola serupa terlihat di Provinsi Jawa Timur, di mana angka kemiskinan turun menurun lebih stabil dari 29,1% turun 12,5%. Namun, sepanjang periode ini tingkat kemiskinan Kabupaten Bangkalan selalu berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Penurunan kemiskinan yang terjadi belum menunjukkan konsistensi yang kuat, sehingga mengindikasikan bahwa faktor ekonomi makro yang mencerminkan kondisi perekonomian secara menyeluruh belum berperan secara optimal dalam menekan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, diperlukan berbagai upaya pemerintah dalam mempercepat pengurangan kemiskinan.

Kemiskinan dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya adalah TPT, dimana kemakmuran suatu masyarakat dapat dilihat berdasarkan pendapatannya. Menurut Sukirno (2000), pengangguran akan berdampak pada menekan pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan atau tingkat kemakmuran yang telah dicapai menjadi berkurang lalu menimbulkan permasalahan kemiskinan [1]. Berdasarkan BPS, TPT di Kabupaten Bangkalan memperlihatkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2000 hingga 2004, TPT Bangkalan relatif rendah, berada di kisaran 1,66% sampai 5,26%. Namun, pada tahun 2005 dan 2006 terjadi peningkatan yang signifikan mencapai 17,4% dan 10,56%, yang memperlihatkan adanya keterbatasan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2007 hingga 2019 angka pengangguran mengalami penurunan meskipun masih memperlihatkan pola fluktuatif dengan rata-rata persentase dibawah 8%. Pada tahun 2020 hingga tahun 2022 kembali terjadi peningkatan signifikan mencapai 8,77% yang dipicu oleh melambatnya aktivitas ekonomi akibat merebaknya COVID-19. Pada tahun 2023 dan 2024 angka pengangguran mencapai 5,35% tahun 2024, yang menunjukkan adanya kenaikan penyerapan tenaga kerja. Walaupun tingkat pengangguran menunjukkan tren membaik, kondisi kemiskinan di Kabupaten Bangkalan masih tergolong tinggi. Di satu sisi, faktor pertumbuhan ekonomi juga dapat berpengaruh. Untuk menurunkan angka kemiskinan dapat dilihat dari kestabilan pertumbuhan ekonomi.

Selain melihat capaian statistik, penting memperhatikan siapa yang berperan terhadap pertumbuhan ekonomi. Perkembangan pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi apabila manfaat dari hasil pertumbuhan hanya dirasakan sebagian kecil masyarakat. Namun, jika banyak keterlibatan masyarakat pada kenaikan pertumbuhan ekonomi, maka naiknya pertumbuhan akan terjadi. [2]. Tumbuhnya ekonomi adalah salah satu ukuran penting pada pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

[3]

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan selama periode 2000-2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2000 - 2010 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya yang relatif stabil walau terjadi perlambatan pada tahun 2012-2016. Terjadi penurunan di tahun 2020 yang karena melemahnya aktivitas perekonomian akibat pandemi COVID-19, dan pada tahun 2023-2024 pertumbuhan ekonomi kembali positif sebesar 1,2% dan 1,94%. Pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi memperlihatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menurunkan tingkat kemiskinan [4]. Pertumbuhan ekonomi yang positif menjadi faktor penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, namun tanpa disertai pemerataan hasil pembangunan dan penurunan ketimpangan, dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan menjadi terbatas

Dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan, pemerintah menerapkan kebijakan terkait otonomi daerah dengan memberi kewenangan lebih luas ke pemerintah daerah. Kebijakan otonomi daerah menyebabkan terjadinya perubahan dalam pembagian kewenangan serta juga tanggung jawab dalam pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, khususnya pada kelola dan pengalokasian sumber daya. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, sebagian urusan yang semul ditangani oleh pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah. Pengalihan kewenangan tersebut tak hanya mencakup aspek penyerahan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta SDM disesuaikan dengan kewenangan yang telah dilimpahkan. Pelaksanaan dari otonomi daerah menuntut pemerintah daerah menjalankan pengelolaan keuangan lebih mandiri dengan mengoptimalkan PAD [5].

Secara teoritis, guna mengukur kemandirian dari suatu daerah dapat dilihat lewat PAD. PAD asalnya dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, perusahaan milik daerah serta pengolahan kekayaan daerah lain yang mana terpisahkan, serta juga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Namun menurut Kuncoro [5], memperlihatkan bahwasanya dalam realisasinya Kontribusi PAD hanya dapat mencapai maksimal sebesar 20%. Dilaksanakannya desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah pusat menyalurkan transfer ke pemerintah daerah yang mana menjadi bentuk pelaksanaan tanggung jawabnya. Berdasarkan teori, PAD mempunyai pengaruh negatif ke tingkat kemiskinan, di mana meningkatnya PAD diharapkan mampu menurunkan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah guna membiayai pembangunan serta program sosial. Namun, pada kenyataannya tidak selalu berjalan sesuai dengan teori. Di Kabupaten Bangkalan, PAD mengalami peningkatan yang cukup besar dari 233,18 miliar rupiah menjadi 341,12 miliar rupiah pada tahun 2020 - 2024. Meskipun PAD terus meningkat, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan masih tergolong tinggi, sehingga memperlihatkan bahwa kenaikan PAD belum sepenuhnya mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan dan merata.

Pada penelitian Qoiriyah et al., [6] memperlihatkan bahwasanya tumbuhnya ekonomi dan juga tingkat pengangguran terbuka tidak punya pengaruh signifikan. Hal ini telah diteliti di Kabupaten Probolinggo memakai pendekatan kuantitatif dan analisis regresi linier berganda. Selain itu, Meysinta & Aini [7] memperlihatkan PAD, pendapatan transfer, hibah, serta juga bansos bersama-sama berpengaruh signifikan ke kemiskinan. Hal ini telah diteliti di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat memakai pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi linier berganda. Sehingga tujuan dari penelitian ini melihat pengaruh dari faktor ekonomi tersebut terhadap tingkat kemiskinan dan membandingkan hasilnya dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, harapan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bagaimana Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, dan PAD berperan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan Kabupaten Bangkalan.

Metode

Pendekatan penelitian memakai kuantitatif [8] guna menguji dan analisis teori serta mengidentifikasi hubungan antar variabel yang diteliti. Penelitian menganalisis pengaruh dari variabel TPT, Pertumbuhan Ekonomi, dan PAD terhadap Tingkat Kemiskinan dengan mempergunakan data time series yang mana 25 tahun lamanya pada periode 2000–2024 di Kabupaten Bangkalan. Menggunakan data sekunder melalui BPS [9] dan DJKP Kemenkeu selama periode 2000–2024. variabel penelitian mencakup Tingkat Pengangguran Terbuka (X_1) dengan satuan persen, Pertumbuhan Ekonomi (X_2) dengan satuan persen, dan Pendapatan asli Daerah (X_3) dalam satuan miliar rupiah, serta Tingkat Kemiskinan (Y) dalam satuan persen. Analisis data dijalankan dengan memakai regresi linier berganda. Penulis dalam penelitian ini memakai alat pengolahan berupa program EViews 12.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dipakai guna menentukan apakah residual yang mana dihasilkan dari model regresi distribusinya normal.

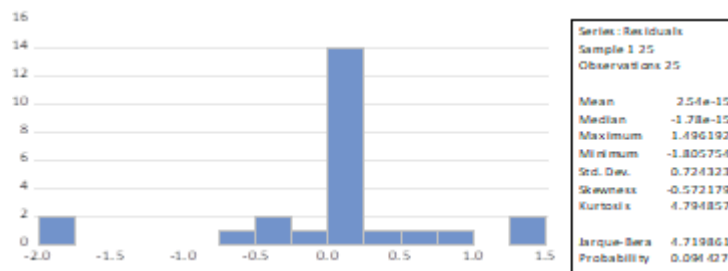


Figure 2. Hasil Uji Normalitas

Merujuk ke Gambar 2, Hasil uji ini memperlihatkan bahwasanya probabilitas *Jarque-Bera* besarnya 0,094427 ($> 0,05$), sehingga residual dalam model terdistribusi dengan normal

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dipakai 'guna menguji antarvariabel independen dalam model regresi apakah punya tingkatan korelasi tinggi.

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	7.768139	8.747991	NA
TPT	0.097744	5.255753	1.001566
PE	0.103702	2.022501	1.292843
PAD	7.41E-05	2.784926	1.292159

Figure 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Merujuk ke Gambar 3, Hasil uji yakni tiap variabel memiliki nilai VIF < 10 , maka dari itu disimpulkan jika tak terdapat multikolinearitas pada model.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dipergunakan dalam menguji apakah varians residual pada model regresi sifatnya seragam atau bervariasi antarobservasi.

Heteroskedasticity Test: Glejser			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1.096551	Prob. F(3,21)	0.3725
Obs*R-squared	3.385859	Prob. Chi-Square(3)	0.3359
Scaled explained SS	3.725166	Prob. Chi-Square(3)	0.2927

Figure 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Merujuk ke Gambar 4, Hasil uji Glejser menunjukkan bahwasanya nilai prob $> 0,05$, maka dari itu disimpulkan tidak terdapatnya heteroskedastisitas pada regresi.

d. Uji Autokorelasi

Hasil Uji autokorelasi yaitu:

Tabel 1. Hasil Uji Autokorelasi

Durbin Watson	2.112215
---------------	----------

Merujuk pada tabel 1, hasil *Durbin-Watson*, diperoleh 2,499457. Nilai tersebut ada di sekitar angka 2, disimpulkan model regresi tidak ada masalah autokorelasi yang signifikan, meskipun terdapat kecenderungan autokorelasi negatif yang lemah.

2. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) ialah sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Koefisien Determinasi

Adjusted R-squared	0.517105
--------------------	----------

Merujuk Pada tabel 2, diketahui *Adjusted R-squared* = 0.517105 atau sama dengan 51,71%, menunjukkan tingkat kemiskinan dijelaskan oleh TPT, Pertumbuhan Ekonomi, dan PAD sebesar 60,49% sementara sisanya 48,29% dijelaskan variabel lainnya diluar model regresi.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Uji F

F-statistic	9.566761
Prob(F-statistic)	0.000350

Merujuk pada tabel 3, Uji F bertujuan mengetahui apakah keseluruhan variabel bebas bersamaan memengaruhi variabel terikat, dasar pengambilan keputusan yakni F hitung > F tabel bernilai tingkat probabilitas < 0,05 dinyatakan variabel independen bersamaan memengaruhi variabel dependen. Merujuk ke uji F yang telah dijalankan pada tabel 3, diperoleh nilai Prob(F-statistic) 0.000350 < 0,05 dengan F hitung besarnya 9.566761 < F tabel besarnya 3,05 yang dapat disimpulkan bahwa TPT, Pertumbuhan Ekonomi, dan PAD bersama-sama berpengaruh signifikan ke tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan.

c. Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	31.33349	2.787138	11.24217	0.0000
TPT	-0.051679	0.312641	-0.165299	0.8703
PE	0.117414	0.322028	0.364608	0.7191
PAD	-0.038981	0.008609	-4.528062	0.0002

Figure 5. Hasil Uji t

Merujuk ke gambar 5, hasil dari Uji t, maka:

- 1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) punya t hitung -0.165299 dengan arah hubungan negatif, t hitung < t tabel 1.71714 dan nilai sig. 0.8703 > 0,05 disimpulkan TPT tidak berpengaruh signifikan ke Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan.
- 2) Pertumbuhan Ekonomi punya nilai t hitung 0.364608 dengan arah hubungan positif, Nilai t hitung < 1.71714 dan nilai sig. 0.7191 > 0,05 dsimpulkan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan ke Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan.
- 3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bernilai t hitung -4.528062 dengan arah hubungan negatif, Nilai t hitung > 1.71714 dan nilai sig. 0.0002 < 0,05 dapat disimpulkan PAD punya pengaruh negatif signifikan ke Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil dari penelitian memperlihatkan peningkatan TPT tidak memengaruhi naik turunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan tahun 2000–2024. TPT tidak menjadi faktor yang dapat meningkatkan angka kemiskinan di Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu, fluktuasi TPT tak selalu berdampak langsung terhadap perubahan tingkat kemiskinan. Kondisi tersebut terjadi karena pengangguran bersifat sementara seperti adanya kelompok angkatan kerja baru menyelesaikan pendidikan dan masih dalam proses mencari pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi serta kualifikasi yang dimiliki agar memperoleh pendapatan yang memadai. Di sisi lain, sebagian pencari kerja masih memperoleh dukungan ekonomi dari keluarga sehingga belum menghadapi tekanan pendapatan secara langsung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, sekitar 72,80% penduduk bekerja di sektor informal seperti berusaha sendiri, buruh tidak tetap, pekerja bebas, serta pekerja keluarga. Kondisi ini menunjukkan banyak tenaga kerja yang bekerja tanpa kontrak kerja yang jelas, dengan pendapatan yang cenderung tidak tetap dan perlindungan sosial yang terbatas [10]. Dalam sektor ini, meskipun seseorang secara status telah bekerja dan tidak lagi dikategorikan sebagai pengangguran, kondisi tersebut belum tentu mampu mengeluarkannya dari kemiskinan karena pendapatan yang diperoleh belum mencukupi kebutuhan hidup secara layak [11]. Penelitian ini selaras dengan penelitian [12] karena sebagian besar penganggur merupakan lulusan baru yang masih berada dalam tahap pencarian pekerjaan. Selain itu, mereka umumnya masih memperoleh dukungan ekonomi dari keluarga

sehingga kebutuhan hidup sehari-hari tetap dapat terpenuhi

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil tersebut memperlihatkan bahwasanya peningkatan Pertumbuhan Ekonomi tidak memengaruhi perubahan tingkat kemiskinan Kabupaten Bangkalan selama periode 2000–2024. Pertumbuhan ekonomi yang tak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan ini memperlihatkan kurangnya kualitas dari pertumbuhan ekonomi dikarenakan terkonsentrasi pada sektor Pertanian sebesar 20,79% di Kabupaten Bangkalan. Ini disebabkan pertumbuhan tersebut berpusat pada sektor yang berproduktivitas rendah dan tradisional yang mempengaruhi upah menjadi rendah serta sifatnya musiman membuat peningkatan kesejahteraan tidak terjadi. Kondisi ini berarti walaupun terjadi peningkatan output tetapi tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan yang merata di masyarakat. Selain itu, berdasarkan data BPS Kabupaten Bangkalan, Nilai Gini Ratio tahun 2024 sebesar 0,301 memperlihatkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Bangkalan masih berada pada kategori ketimpangan sedang. Kondisi tersebut mengindikasikan manfaat pertumbuhan ekonomi belum merata dirasakan keseluruhan masyarakat [13]. Akibatnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi belum bisa menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan karena sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam mengakses peluang ekonomi dan sumber pendapatan. Ini sejalan dengan penelitian [14] yang mana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi belum mampu menekan tingkat kemiskinan dengan optimal. Ini memperlihatkan bahwasanya manfaatnya belum dirasakan dengan merata terutama kelompok berpendapatan rendah.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil dari penelitian menyatakan bahwasanya peningkatan PAD menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan selama 2000–2024. Dengan semakin tingginya PAD yang dimiliki daerah, kemampuan pemerintah daerah saat membiayai pembangunan, menyediakan sarana dan prasarana publik, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga penurunan tingkat kemiskinan dapat didukung secara lebih optimal. Kondisi ini dijelaskan bahwa peningkatan PAD di Kabupaten Bangkalan membuat pemerintah daerah punya ruang yang lebih besar dalam melaksanakan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seperti dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM serta menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat. Dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap fasilitas dan kesempatan ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat dapat meningkat sehingga berdampak ke turunnya tingkat kemiskinan [15]. Temuan selaras dengan penelitian [7], dimana peningkatan PAD mampu memperkuat kemampuan keuangan daerah, sehingga pemerintah lebih optimal dalam menyediakan pelayanan publik dan memenuhi prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan tidak dipengaruhi oleh kondisi ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga kemampuan pemerintah daerah terkait pengelolaan sumber daya fiskalnya. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan PAD mampu mendukung upaya pengentasan kemiskinan, sedangkan perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan juga pertumbuhan ekonomi belum memberikan pengaruh signifikan ke perubahan tingkat kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi perlu diiringi dengan pemerataan manfaat pembangunan dan penguatan kapasitas fiskal daerah agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan serta diharapkan terus mengoptimalkan pengelolaan PAD guna mendukung program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Penelitian kedepannya dapat mengembangkan penelitian lewat penggunaan variabel lain yang mana berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan.

References

1. R. D. Aprian, “Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten Periode 2010-2018,” 2020.
2. A. D. Ayuningtyas, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Ketergantungan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kebumen,” 2023.
3. Lesfandra, “Pengaruh ekspor, penanaman modal asing, dan penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia,” *J. Sos. Ekon. dan Hum.*, vol. 7, no. 1, 2021, doi: 10.29303/jseh.v7i1.45.
4. Dahliannur, I. Afrilia, E. Selgia, A. Safitri, K. Akbar, and A. Rasyid, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia,” *J. Golden Gener. Econ.*, vol. 2, no. 1, pp. 52–59, 2026, doi: 10.65244/jggeconomic.v2i1.307.
5. N. I. Fitriyanti and H. R. Handayani, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah,” *Diponegoro J. Econ.*, vol. 9, no. 2, pp. 79–90, 2020, doi: 10.14710/djoe.31536.
6. M. Qoiriyah, Marseto, and A. F. Utami, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo,” *J. Akuntansi, Ekon. dan Manaj. Bisnis*, vol. 5, no. 3, pp. 8–24, 2021, doi: 10.55606/jaemb.v5i3.6384.
7. D. P. Meysinta and Z. Aini, “Pengaruh PAD, Pendapatan Transfer, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan,” *J. EMT KITA*, vol. 9, no. 3, pp. 817–831, 2025, doi: 10.35870/emt.v9i3.3995.
8. Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.
9. BPS, “Booklet Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional),” Badan Pusat Statistik, vol. 1, pp. 1–4, 2021.
10. F. Cantika, “Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung,” 2023, doi: 10.52851/cakrawala.v5i2.122.
11. A. Sulistiawan, “Pengaruh UMP, Produk Domestik Bruto dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Pulau

- Jawa,” *J. Ilmu Ekon.*, vol. 7, no. 1, pp. 115–126, 2023, doi: 10.22219/jie.v7i01.22271.
12. F. A. Junaedi and S. Muljaningsih, “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Nganjuk,” *Equity J. Ekon.*, vol. 8, no. 1, pp. 46–58, 2022, doi: 10.33019/equity.v10i1.84.
 13. N. Nina, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Pulau Madura Tahun 2004–2015,” 2018.
 14. G. F. Faadihilah and W. P. Primadha, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bekasi,” *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, vol. 9, no. 5, pp. 1794–1801, 2023, doi: 10.35870/jemsi.v9i5.1462.
 15. M. Kamal, “Hubungan Pemerintahan Daerah dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014,” *SIGn J. Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 18–28, 2019, doi: 10.37276/sjh.v1i1.32.